

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PULAU LOMBOK**

**Putri Salsabila Aprilia<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
[putrisalsabilaapriliaym@gmail.com](mailto:putrisalsabilaapriliaym@gmail.com)

**Muhammad Ali Fikri<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
[fikrisampala@unram.ac.id](mailto:fikrisampala@unram.ac.id)

**Adhitya Bayu Suryantara<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
[adhityabayus@unram.ac.id](mailto:adhityabayus@unram.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat di pulau lombok berdasarkan data yang terdapat di *website*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif Kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan pertanyaan tertutup yang berisi tentang pernyataan yang diisi langsung oleh peneliti dengan panduan yang telah ditetapkan dengan 70 sampel. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berdasarkan ISAK35. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas LSM di Pulau Lombok sebesar 2,8% dengan tingkat interval akuntabilitas sangat kurang. Sedangkan berdasarkan ISAK 35 pada posisi laporan keuangan LSM, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan perubahan arus kas dan CALK terdapat pada angka 0% karena belum ditemukan lembaga yang membuat laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35 di websitenya. Tetapi jika dilihat akuntabilitas berdasarkan program atau pada tingkat dimana masyarakat mampu merasakan manfaat dari program yang dimiliki LSM berdasarkan website resmi dari LSM maka sudah ditemukan beberapa foto ataupun dokumentasi bahkan artikel yang memuat berita tentang pengabdian maupun layanan LSM dalam masyarakat menunjukkan bahwa LSM sudah akuntabel dari segi akuntabilitas programnya. Transparansi LSM di pulau Lombok berdasarkan hasil penelitian berada di tingkat cukup kurang karena hanya 22 dari 70 LSM yang memiliki website resmi yang berfungsi untuk menunjukkan segala aktivitas di LSM tersebut. Dimana angka yang ditemukan yaitu pada jumlah 31%, berdasarkan angka ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa LSM lebih fokus terhadap keterbukaan program dibandingkan dengan pertanggungjawaban atas laporan keuangannya.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, LSM**

### **ABSTRACT**

This study aims to find out how big the level of accountability and transparency in the financial management of Non-Governmental Organizations on Lombok Island is based on the data contained on the website. The type of research used by researchers is descriptive quantitative. Where the data collection technique used is using closed questions which contain statements filled directly by the researcher with guidelines that have been set with 70 samples. The data processed in this study are financial statements based on ISAK35. The results of this study can be concluded that the accountability rate of NGOs on the island of Lombok is 2.8% with a very low level of accountability intervals. Meanwhile, based on ISAK 35 in the position of NGO financial statements, comprehensive income reports, net asset change reports, cash flow change statements and CALK is at 0% because no institution has found that has made its financial statements based on ISAK 35 on its website. However, if you look at accountability based on the program or at the level where the community is able to feel the benefits of the program owned by the NGO based on the official website of the NGO, then several photos or documentation have been found and even articles containing news about the service and service of NGOs in the community show that NGOs are accountable in terms of program accountability. The transparency of NGOs on the island of Lombok based on the results of the study is at a fairly low level because only 22 out of 70 NGOs have an official website that serves to show all activities in the NGO. Where the figure found is at 31%. Based on this figure, it can be conclude that NGOs are more focused on program transparency than accountability for their financial reports.

**Keywords: Accountability, Transparency, NGOs**

## PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (*NonGovernmental Organization*) merupakan lembaga atau organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan dari kegiatannya. Sebagaimana Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 8 tahun 1990 tentang pembinaan LSM, yang dimaksud LSM adalah sebuah lembaga/organisasi nonpartisan yang bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya (Boediningsi et al., 2022). Terciptanya sebuah LSM yang sehat, tentunya harus memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam segala bidang, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal pengelolaan keuangan, disebabkan karena banyaknya sumber pendanaan lembaga LSM, diantaranya berasal dari lembaga donor, sumbangan dan hibah dari pihak tertentu. Pihak donatur biasanya mensyaratkan adanya pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sama halnya dengan organisasi nonprofit lainnya, Lembaga Swadaya masyarakat juga menstandarkan Laporan keuangannya yang didasarkan pada Interpretasi Standar akuntansi Keuangan (ISAK) 35. IAI menyatakan bahwa ISAK 35 merupakan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 (Shoimah et al., 2021).

Akuntabilitas dalam hal ini dapat kita artikan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik dari segi vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas vertikal sebagai bentuk tanggung jawab kepada atasan sedangkan horizontal bentuk tanggung jawab kepada publik dan bersifat transparan dalam segala bidang. Maka walaupun akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan (Saputri, 2020). Pelaksanaan kegiatan LSM merupakan bukan bagian dari kegiatan pemerintahan, akan tetapi pelaksanaannya memiliki keterkaitan dengan program pemerintah yaitu dalam APBN maupun APBD. Meskipun LSM telah menjamur di lingkungan masyarakat, akan tetapi banyak pula masyarakat umum yang kurang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan LSM selama membuat pertanggungjawaban hanya membuat kepada donatur tanpa melibatkan masyarakat (Zubaedi, 2013).

Lombok merupakan sebuah pulau yang berada di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau Lombok yang di kenal dengan Pulau Seribu Masjid tentunya memiliki karakteristik yang khas sehingga diberikan gelar tersebut. Karakter panutan dalam masyarakat pulau Lombok salah satunya dengan struktur masyarakat yang dipimpin atau yang dipengaruhi lebih banyak oleh kiyai dan tuan guru, dengan tipikal ini menimbulkan masyarakat Lombok yang religius bahkan rasa simpati dan rasa sosial masyarakat pulau Lombok masih sangat tinggi (Ajim, 2015). Hal ini dibuktikan dengan jumlah LSM yang mencapai angka 234 serta organisasi masyarakat yang menjamur dengan tujuan yang sama dengan LSM yaitu membantu masyarakat dalam mengatasi masalah. Namun terdapat beberapa kekurangan LSM dalam hal pertanggungjawabannya atas dana publik, sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, banyak LSM kurang memperhatikan pentingnya laporan keuangan yang bisa mempengaruhi keputusan donatur dalam memberikan donasi, begitu juga dalam hal keterbukaan, transparansi LSM masih dikatakan minim dikarenakan LSM terbuka hanya kepada donatur dan tidak melibatkan masyarakat, kekurangan LSM ini juga disampaikan oleh Fikri et al., (2010) bahwa akuntabilitas LSM masih lemah dikarenakan LSM hanya membuat laporan keuangannya hanya kepada donatur.

Kasus korupsi yang terjadi pada LSM pernah terjadi pada LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang terdapat di wilayah Lampung. Pada kasus ini Akmal Fathoni yang menjabat sebagai kepala karang taruna Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejari Lamtim pada tanggal 23 September 2021. Akmal Fathoni di masukan kedalam rutan dengan kasus korupsi dana hibah selama 1 tahun dengan melakukan penggelapan laporan keuangan sebesar 100 juta (Yogi, 2021). Kasus yang sama terjadi pada yayasan Lembaga Banten Muda Indonesia (LBMI), A. Faisal Taufik sebagai kepala yayasan LBMI ditahan Kejati Banten dan diduga melakukan korupsi dana hibah sebesar Rp2 Miliar pada tahun 2013 (Yandhi, 2015).

Akibat dari Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pihak SDM sebuah LSM dapat dilihat dari dua kasus diatas. Hal ini dikarenakan personal yang terdapat di LSM tidak menerapkan aspek-aspek dari akuntabilitas baik dalam hal transparansi maupun *liability*, kurangnya kontrol atau pengawasan dari lembaga yang lebih tinggi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab atau kepercayaan yang dilimpahkan kepada lembaga tersebut. Maka dalam hal ini penting sekali setiap lembaga menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan mengingat amanat besar yang dititipkan oleh donatur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan jasa yang ditawarkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengungkapkan sejauh mana tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan data *website*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif, dengan kata lain penelitian kuantitatif yakni penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis statistik. Menurut Fitriyah *et al* (2021) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan semua Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah pulau Lombok yaitu sebanyak 234 Lembaga Swadaya Masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan tehnik *probability sampling*. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan dijadikan sample yaitu dibagi secara proporsional setiap kabupaten/kota sebanyak 14 LSM sehingga diperoleh sample sebanyak 70 LSM yang berada di wilayah pulau Lombok. Menurut Ghozali dalam Bandariy (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum atau di kenal dengan bersifat generik. Statistik generik ini memiliki fungsi untuk mereduksi data atau menyederhanakan data agar mudah diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Mean untuk perhitungan hasil pengolahan data.

Menurut Augustine (2011) Mean atau rata rata ( $\bar{X}$ ) merupakan penjumlahan seluruh nilai ( $\sum X$ ) dibagi dengan jumlah nilai seluruhnya ( $N$ ). Mean atau nilai rata-rata dicari sebagai nilai perwakilan dari jumlah sample. Untuk mencari rata rata populasi, maka pada pada rumusnya  $X$  diganti menjadi  $\mu$ . Untuk mean data berkelompok rumusnya sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum FX}{n}$$

**Tabel 1. Kriteria Akuntabilitas**

Persentase	Keterangan
0%-20%	Sangat kurang
21%-40%	Kurang
41%-60%	Cukup
61%-80%	Baik
81%-100%	Sangat baik

Sumber: (Fitriyah et al., 2021)

## PEMBAHASAN

Lombok merupakan sebuah Pulau yang berada di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali sebelah barat dan selat alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau Lombok terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota diantaranya Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram. Beragamnya masyarakat Pulau Lombok membuat Pemerintah sulit untuk mengeksplor kebutuhan masyarakatnya secara mendalam. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan di masyarakat, maka hal inilah yang melahirkan LSM yang bergerak dalam bidang menswadayakan masyarakat untuk saling membantu maupun merangkul dalam segala aspek, baik dari segi sosial, kesehatan, maupun ekonomi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan pertanyaan tertutup yang berisi tentang pernyataan yang diisi langsung oleh peneliti dengan panduan yang telah ditetapkan. Sumber informasi yang digunakan peneliti berasal dari *website* LSM yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 70 LSM. Penelitian ini mencakup dua aspek dalam akuntabilitas keuangan yaitu keteraksesan

laporan keuangan dan ketersediaan laporan keuangan, sedangkan aspek dalam transparansi yaitu apabila LSM memiliki *website*. Keteraksesan informasi keuangan dalam LSM pada *website* resmi masing-masing didefinisikan dengan tingkat kemudahan pengguna dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di *website* LSM. Indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur keteraksesan informasi keuangan pada LSM dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu apabila LSM memiliki *website* akan diberi nilai 1 jika tidak maka akan diberi nilai 0.

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas *Financial* merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal dana publik, setiap pendapatan yang didapatkan oleh LSM baik yang bersumber dari pendapatan terikat maupun tidak terikat harus dialokasikan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang ditentukan sebelumnya, dan harus dituangkan dalam Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban finansialnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketersediaan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 sebagai pengukuran akuntabilitas *financial* Lembaga Swadaya Masyarakat yang tersedia di *website*.

#### (1) Ketersediaan laporan keuangan

LSM dikatakan akuntabel apabila mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan operasional maupun finansialnya ke publik, salah satunya yaitu dengan memiliki laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan di dalam *website*, hanya LSM Transform Indonesia dan Yayasan Peduli Anak yang memiliki laporan keuangan di akun resminya, perhitungan Mean atau nilai rata-rata dari 70 LSM sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum FX}{n}$$

$$M = \frac{2}{70} \times 100\% = 2,85\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh dari 70 LSM yang ada di Pulau Lombok nilai mean sebesar 2,85%, sisanya 68 LSM belum memiliki Laporan Keuangan pada akun websitenya.

**Tabel 2. ketersediaan Laporan Keuangan**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase ketersediaan
1	Tersedia	2	2,85%
2	Tidak Tersedia	68	97,15%
Jumlah			100%

(2) Laporan posisi keuangan

Kegunaan dari posisi laporan keuangan yaitu untuk membaca dengan jelas bagaimana posisi aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu laporan keuangan dalam periode yang sudah ditentukan. Dengan membaca posisi laporan keuangan, hal ini bisa menjadi bahan tolak ukur untuk menentukan langkah selanjutnya bagi LSM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa LSM adalah lembaga non profit yang bergerak di bidang jasa untuk melayani masyarakat, maka posisi laporan keuangan memberikan manfaat sebagai penilaian kemampuan organisasi dalam mengolah aktiva

**Tabel 3. Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersedian
1	Tersedia	0	0%
2	Tidak tersedia	70	100%
Jumlah			100%

Dalam penelitian ini belum ditemukan Lembaga yang membuat laporan posisi keuangannya. Namun dari 70 sample LSM ditemukan satu lembaga yang membuat laporan posisi keuangan yaitu Yayasan Peduli Anak, hanya saja dalam pelaporannya, Annual Report YPA pada tahun 2021 masih menggunakan PSAK 45 dan belum menyesuaikan dengan pelaporan entitas berorientasi nonlaba terbaru yaitu menggunakan ISAK 35.

(3) Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif di dalam ISAK 35 dijelaskan bahwa entitas berorientasi nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri, artinya laporan keuangan disesuaikan dan *fleksibel* sepanjang penggunaannya mencerminkan fungsi yang sesuai dengan isi laporan keuangannya (Safitri et al., 2022). Laporan penghasilan komprehensif berisi pendapatan dan beban dari lembaga, laporan ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja LSM selama satu periode tertentu.

**Tabel 4. Ketersediaan Penghasilan Komprehensif**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersediann
1	Tersedia	0	0%
2	Tidak tersedia	70	100%
Jumlah			100%

Dari data website 70 LSM yang ada di Pulau Lombok, belum ada lembaga yang membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Namun ditemukan hanya satu yang memiliki pertanggungjawaban atas laporan keuangannya yaitu Yayasan Peduli Anak, dalam laporan keuangannya, yayasan peduli anak masih menggunakan PSAK 45 yaitu berupa *Statement of Activities* atau laporan aktivitas.

(4) Laporan Perubahan Aset Netto

Laporan Perubahan Aset Netto dalam ISAK 35 sangat penting bagi laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga nonlaba lainnya, karena bertujuan untuk melihat saldo akhir dari aset netto yang didapat dari total aset netto tanpa pembatasan ditambah dengan surplus/defisit dan total aset netto dengan pembatasan (Safitri et al., 2022).

**Tabel 5. Ketersediaan Laporan Perubahan Netto**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersediann
1	Tersedia	0	0%
2	Tidak tersedia	70	100%
Jumlah			100%

Dari 70 LSM yang ada di Pulau Lombok, belum ditemukan Laporan Perubahan Aset Netto dalam websitenya.

(5) Laporan Arus Kas

Adanya Laporan arus kas berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai pengeluaran maupun penerimaan arus kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dalam suatu periode (Nainngolan, 2007).

**Tabel 6. Ketersediaan Laporan Arus Kas**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersediann
1	Tersedia	0	0%
2	Tidak tersedia	70	100%
Jumlah			100%

Dalam penelitian ini belum ditemukan Lembaga yang memiliki Laporan Arus kas pada laman websitenya.

(6) Catatan A/LK

CaLK atau Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan di dalam laporan keuangan, CaLK memuat penjelasan tentang profil entitas, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lainnya (Safitri et al., 2022).

**Tabel 7. Ketersediaan CaLK**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersediann
1	Tersedia	0	0%
2	Tidak tersedia	70	100%
Jumlah			100%

Peneliti juga belum menemukan adanya Catatan atas Laporan Keuangan pada website masing-masing LSM. Kesimpulan yang diperoleh dari Akuntabilitas financial LSM di Pulau Lombok dengan pengukuran Ketersediaan Laporan keuangan pada website LSM yaitu sebesar 0,285%, sedangkan penyajian Laporan Keuangan dalam ISAK 35 masih 0%, dari 70 LSM hanya dua yang memiliki Laporan Keuangan di websitenya yaitu Transform Indonesia dan Yayasan Peduli Anak. Namun bukan hanya melihat dari 2 LSM tersebut, 68 sample LSM dalam penelitian ini belum mengupload Laporan keuangannya di akun resmi masing-masing LSM, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ketersediaan laporan keuangan sebesar 2,85% dan nilai laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yaitu sebesar 0% jika dikaitkan dengan kriteria akuntabilitas pada tabel 3.3 berada pada interval 0%-20% yang menunjukkan akuntabilitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Pulau Lombok masih sangat kurang.

## 2. Transparansi Program

Transparansi dapat kita artikan sebagai memberikan informasi baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan kepada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan dari laporan keuangan tersebut salah satunya adalah donatur kalau bagi sebuah LSM. Dengan adanya transparansi maka pihak-pihak pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah ataupun donatur dapat mengetahui informasi baik terkait aktivitas pengelolaan sumber daya yang di miliki LSM berupa dana publik dengan berbentuk laporan keuangan ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Transparansi memberikan akses kepada pemangku kepentingan baik berupa keterbukaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian ataupun kebijakan.

Adanya transparansi dalam sebuah LSM dapat menjadikan LSM sebagai sebuah lembaga yang terpercaya, dapat meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan dana publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan website sebagai tolak ukur bagaimana bentuk transparansi dari LSM, hal ini dikarenakan pada era modern ini teknologi digital setiap informasi yang di butuhkan oleh publik dapat diakses dengan bantuan internet yaitu website. Transparansi program LSM yang terdapat di Pulau Lombok berdasarkan data yang digunakan sebanyak 70 sampel mendapatkan hasil yaitu:

**Tabel 8. Ketersediaan Transparansi**

No	Ketersediaan	Jumlah	Persentase Ketersediaan
1	Tersedia	22	31,4%
2	Tidak tersedia	48	68,6%
Jumlah			100%

$$M = \frac{\sum FX}{n}$$

$$M = \frac{22}{70} \times 100\% = 31,4\%$$

Perhitungan di tabel 8. dapat di peroleh dari 70 LSM di Pulau Lombok ini mean sebesar 31,4% sisanya 48 LSM yang tidak memiliki website. Ini menunjukkan bagaimana LSM belum memiliki akses keterbukaan kepada masyarakat terkait setiap aktivitas yang di lakukan oleh LSM. Kesadaran pengelola LSM dalam membuat akun resmi dari lembaga yang dikelola merupakan faktor penting, hal ini di karenakan apabila memiliki sumber daya manusia yang mumpuni akan tekhnologi maka akan mudah untuk membuat akun resmi website LSM.

## KESIMPULAN

Desakan stakeholder atas pentingnya akuntabilitas dan transparansi, sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana setiap badan publik wajib memberikan keterbukaan infromasi menjadikan LSM harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dari segi akuntabilitas laporan keuangan, angka akuntabilitas ketersediaan laporan keuangan pada website sebesar 2,8%, sedangkan akuntabilitas Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 sebesar 0%, karena belum ditemukan LSM yang membuat laporan keuangannya sesuai standar terbaru ini. sedangkan transparansi program berada pada angka 31%. LSM lebih fokus terhadap keterbukaan programnya dibandingkan dengan pertanggungjawaban atas laporan keuangannya sehingga ada 2 kemungkinan yang dapat diambil kesimpulan dari angka ini yaitu:

1. LSM di pulau Lombok tidak ingin mempublikasikan Laporan Keuangannya, karena LSM merasa hanya perlu memberikan pertanggungjawaban atas keuangannya hanya kepada donatur, walaupun terdapat regulasi UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, LSM menganggap bahwa regulasi tersebut masih lemah karena tidak ada lembaga yang menuntut dan mengawgawasi yang menimbulkan reward dan punishment. Regulasi tersebut dibuat untuk melindungi hak masyarakat yang membutuhkan informasi laporan keuangan pada LSM seperti calon donatur dan bahan penelitian.
2. LSM tidak membuat laporan keuangan yang akan dipublikasikan, hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia LSM yang ada di Pulau Lombok. Sesuai dengan angka harapan lama sekolah berkisar 5,95 tahun-12,69 tahun yang dapat kita artikan pendidikan masyarakat pulau lombok hanya sampai jenjang SMA/MA sederajat, kemudian tidak ada lembaga pendukung yang memberikan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan dengan standar terbaru yaitu ISAK 35.



## REFERENSI

- Agustin, L. G. R. U. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi Pada Psaa Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), 408. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i2.20067>
- AJIM, N. (2015). *Sifat Dan Karakteristik Masyarakat Indonesia*. 1. <https://www.bing.com/search?q=karakteristik+suku+sasak&cvid=26bc616593a9417fa55daf91e598821f&aqs=edge.0.012j69i59j69i57j015.3282j0j4&FORM=ANAB01&PC=ASTS>
- Ardhiyanti, A. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi pada panti asuhan (Studi Kasus pada Pati Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga). *Skripsi*.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah). *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Augustine, L. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Manajemen* (T. Lestari (ed.)).
- Augustine, Y., & Kristaung, R. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Dian Rakyat.
- Bandariy, H. (2011). *Keuangan Daerah ( Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)*.
- Baru, K. (2020). *standar operasional prosedur keuangan (SOP Keuangan)*. 11.
- Bastian. (2007). *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik* (S. Saat & M. M. Hardani, Wibi (ed.)). ERLANGGA.
- Boediningsi, W., Rusmaya, E., Narotama, U., Boediningsi, W., Rusmaya, E., & Narotama, U. (2022). *Peran lembaga swadaya masyarakat (lsm) dalam masyarakat sosial*. 2(2), 282–291.
- Churnawati, & Suryono. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitasd Laporan Pengelolaan Dana Pada Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–15.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 JO UU Nomor 28 Tahun 2004)* (I. Jauhari (ed.)). Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G., & Purnomosidhi, B. (2010). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 417–428. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.12.7101>
- Haerul, A. M. (2021). *Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, dan Leverage Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan daerah (Studi pada Pemerintah Daerah se-Luwu Raya)*.

- Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Doctoral dissertation, IAIN Jember*. <http://digilib.iain-jember.ac.id/940/1/SKRIPSI.pdf>
- Johantri, B. (2022). *Mengukur akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah*.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Jusrang. (2021). *Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian laporan Keuangan entitas Berorientasi Nonlaba ( Studi kasus pada : Aksi cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan)*. 35, 6.
- Mahanani, E., & Sari, B. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Kauman Krian Berdasarkan PSAK No. 45. *Ikraith-Humaniora*, 2(2), 31–40.
- Manopo, D. C. (2016). *Pelaksanaan AKuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Nainngolan. (2007). *Akuntansi Keuangan yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Nikmahtul, M., & Darno. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Donatur Di Yayasan Sosial Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Terapan Vol.*, 1(1), 1–8.
- Nur Fitriyah, Herlina Pusparini, & Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 33–45. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.123>
- Pamungkas, A. R., & Hariadi, B. (2015). Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.
- Pandini, I. (2013). *Analisis Praktek Akuntabilitas dan Wujud Transparansi di Organisasi Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Raya Darul Amal Salatiga)*.
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito*. <http://repository.stiedewantara.ac.id/2481/>
- Purwanto, & Sulistyastuti. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial* (2 ed.). Penerbit Gava Media Anggota IKAPI DIY.
- Putri, R. A. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur di Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqah Muhamadiyah Sulawesi Selatan*. 6.

- Rifainy, Sudarsana, & Al., E. (2018). Implementasi Visi Kota Mataram Religius, Maju dan Berbudaya Dalam Budaya Hukum Reposisi Awig-Awig Lingkungan Media Pelestarian Adat Sasak Luwiringama (Studi Kasus Dilingkungan Kekalik Kijang Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Mataram). *Open Journal Systems*, 12(10), 489–500.
- Rukmini, M. (2015). *Kritik dan Otokritik LSM* (H. Abidin (ed.)). <http://lingkarlsm.com/karakteristik-lsm/>
- Rusdiana, M., & Nasihudin, M. P. (2002). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian* (M. S. Dulwahab, Encep. & M. P. Nurhayati, Tresna (ed.)). Pusat Penelitian dan penerbitan UIN SGD bandung.
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Tpq Al-Barokah Pekalongan. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 2(2), 37–50. <https://doi.org/10.56696/jaka.v2i2.5415>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Saputri, R. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Pengembangann Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten). *Skripsi*, 1–125.
- Sari, D. M., & Khaerani, T. R. (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Sari, M. F. (2017). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Swadaya Masyarakat ( Lsm ) Algehins* *Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Swadaya Masyarakat ( Lsm ) Alhgeins*.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sarwono, J., & Budiono, H. (2012). *Statistik Terapan : Aplikasi untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. PT. Elex media Komputindo. [https://www.google.co.id/books/edition/Statistik\\_Terapan\\_Aplikasi\\_untuk\\_Riset\\_S/dNtMDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+variabel+dummy&pg=PA299&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Statistik_Terapan_Aplikasi_untuk_Riset_S/dNtMDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengertian+variabel+dummy&pg=PA299&printsec=frontcover)
- Seftiana, & Martadinata. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2. <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/693/509>
- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 243–259. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>

- Sriharyanto, E. (2019). *Profil dan Potensi Daerah Tertinggal Kepulauan Nusa Tenggara* (Ratnawati, A. T. Sulistiyani, H. Sudaryanto, A. Charolina, S. R. Puspitasari, K. Yuliani, & S. Budyono (ed.)). Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi. [https://www.google.co.id/books/edition/Profil\\_dan\\_Potensi\\_Daerah\\_Tertinggal\\_Kep/SyQZEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=PROFIL+KABUPATEN+LOMBOK+UTARA&pg=PA38&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Profil_dan_Potensi_Daerah_Tertinggal_Kep/SyQZEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=PROFIL+KABUPATEN+LOMBOK+UTARA&pg=PA38&printsec=frontcover)
- Sukmawati, F., Pujiningsih, S., & Laily, N. (2009). *Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory*.
- Syarifudin, A. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung*. 2507(February), 1–9.
- Tirtosudarmo, R. (2021). *Mencari Indonesia 2 Batas-Batas Rekayasa Sosial* (N. Supriyanti & F. Suhendra (ed.); 2 ed.). BRIN. [https://www.google.co.id/books/edition/Mencari\\_Indonesia\\_2\\_Batas\\_Batas\\_Rekayasa/dTiiEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=LSM+LOMBOK&pg=PA131&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mencari_Indonesia_2_Batas_Batas_Rekayasa/dTiiEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=LSM+LOMBOK&pg=PA131&printsec=frontcover)
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Winarno. (2013). Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani. *Universitas Negeri Malang (UM PRESS)*, 143 hlm. <http://lib.um.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Metodologi-Penelitian.pdf>
- Yandhi. (2015). *Diduga Tilep Dana Hibah Rp 2 M, Ketua LSM Ditahan Kejati Banten*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/2252701/diduga-tilep-dana-hibah-rp-2-m-ketua-lsm-ditahan-kejati-banten>
- Yogi. (2021). *Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Diduga Selewengkan Dana Hibah Rp 100 Juta*. Tribunlampung.com. <https://lampung.tribunnews.com/2021/09/23/jadi-tersangka-wakil-ketua-dprd-lampung-timur-diduga-selewengkan-dana-hibah-rp-100-juta?page=1>
- Yuanita, E., & Suripto, B. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 438–455. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>
- Yusuf, R. R. (2021). Globalisasi dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 3(2), 35–43.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (pertama). KENCANA.